



2022

RENCANA KERJA (RENJA)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
1.1 Latar Belakang	- 1 -
1.2 Landasan Hukum	- 2 -
1.3 Maksud dan Tujuan	- 4 -
1.4 Sistematika Penulisan	- 5 -
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	- 6 -
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	- 6 -
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto	- 12 -
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	- 24 -
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	- 26 -
2.5 Penelaahan Usulan Program	- 26 -
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	- 28 -
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	- 28 -
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	- 29 -
3.3 Program dan Kegiatan.....	- 30 -
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	- 37 -
BAB V PENUTUP.....	- 47 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Kegiatan Yang Memenuhi Target 2020	- 8 -
Tabel 2.2 Kegiatan Tahun 2021 Yang Telah Terealisasi Sampai Dengan 31 Desember 2021	- 9 -
Tabel 2.3 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS dari Unsur Persyaratan Layanan	- 13 -
Tabel 2.4 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS dari Unsur Prosedur Layanan	- 14 -
Tabel 2.5 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS dari Unsur Prosedur Layanan	- 14 -
Tabel 2.6 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar	- 15 -
Tabel 2.7 Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	- 16 -
Tabel 2.8 Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional.....	- 17 -
Tabel 2.9 Kepuasan Masyarakat Terhadap Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	- 18 -
Tabel 2.10 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Tambahannya Penghasilan Pegawai / TPP.....	- 19 -
Tabel 2.11 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sistem Informasi Kepegawaian.....	- 20 -
Tabel 2.12 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan E-PRESENSI	- 21 -
Tabel 2.13 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian.....	- 22 -
Tabel 2.14 Jumlah Peserta dalam Setiap Kegiatan	- 23 -
Tabel 2.15 Penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin PNS Tahun 2021 ...	- 23 -
Tabel 3.1 Sasaran Strategis-Indikator Sasaran (IKU)	- 30 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komposisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Dari Segi Persyaratan Layanan	- 13 -
Gambar 2.2 Komposisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Dari Segi Prosedur Layanan.....	- 13 -
Gambar 2.3 Komposisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Dari Segi Waktu Layanan	- 14 -
Gambar 2.4 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar.....	- 15 -
Gambar 2.5 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU).....	- 16 -
Gambar 2.6 Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional	- 17 -
Gambar 2.7 Kepuasan Masyarakat Terhadap Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.....	- 18 -
Gambar 2.8 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Tambahan Penghasilan Pegawai / TPP	- 19 -
Gambar 2.9 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Sistem Informasi Kepegawaian	- 20 -
Gambar 2.10 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan E-PRESENSI.....	- 21 -
Gambar 2.11 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian	- 22 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terjadinya perubahan di era otonomi/desentralisasi menjadi peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kearah yang lebih baik yang tercermin dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya cita-cita reformasi di negara ini. Dengan ditetapkannya pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Mojokerto secara aman, tertib dan lancar semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh stakeholders untuk bersama-sama seiring dan sejalan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing. Kelancaran Peyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan Nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil.

Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pelaksanaan Otonomi Daerah harus diikuti dengan desentralisasi urusan Kepegawaian. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan Desentralisasi Kepegawaian tersebut diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen PNS secara Nasional tentang norma, standart serta prosedur yang sama dan bersifat Nasional dalam setiap unsur manajemen Kepegawaian.

Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Daerah tahun 2019 - 2023 sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi Pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) di BKPSDM selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja. Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban menyusun Rencana Program Kerja tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara Menyeluruh dengan menyesuaikan Pembangunan yang ada, yang nantinya menjadi acuan penyusunan RAPBD Kota Mojokerto Tahun 2022. Perumusan Program Kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPADM) tahun 2022, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala BKPSDM yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi uraian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, Prioritas dan Sasaran Program Jangka Menengah, serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun Rencana.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2022, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E);
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto.
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 050/1801/417.601.2/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah TA 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto di tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto pada tahun 2022 dengan berdasarkan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022 ;
- 2) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Caapaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan KEGIATAN

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto Tahun 2022, perlu berpedoman kepada hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada tahun n-2 (2020) serta perkiraan capaian tahun berjalan yakni tahun n-1 (2021). Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 dan 2021 dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Mojokerto tahun 2022.

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil Evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan Tahun lalu adalah sebagai berikut.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia realisasi mencapai 98,24% yang terdiri dari Program Pelayanan Kesekretariatan 98,37%, Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur 95,52% dan Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur 99,11%. Namun terdapat 1 (satu) kegiatan dengan realisasi kurang dari 85% dan beberapa kegiatan yang tidak di realisasikan karena mengalami refocusing untuk penanggulangan covid 19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Pagu anggaran sebelum refocusing	: Rp. 3.250.000,00
Anggaran setelah refocusing	: 0
Realisasi keuangan setelah refocusing	: 0

2. Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka

Pagu anggaran sebelum refocusing	:	Rp 361.938.600,00
Anggaran setelah refocusing	:	0
Realisasi keuangan setelah refocusing	:	0

3. Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS

Pagu anggaran	:	Rp. 74.865.590,00
Realisasi keuangan	:	Rp. 63.580.590,00
Indikator Kinerja	:	Jumlah laporan money data kehadiran, data tambahan penghasilan dan kasus disiplin yang terproses
Target	:	10 kasus
Realisasi	:	3 kasus

Tahun 2021

Pada tahun 2021 pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto realisasi atas sub kegiatan yang tidak mencapai target 75% adalah sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan dengan total Rp 3.862.747.587 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

Pagu Anggaran	:	Rp. 11.081.403.844,00
Realisasi	:	Rp. 7.975.942.650,00
% Realisasi	:	71,98 %

2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Pagu Anggaran	:	Rp. 1.161.775.564,00
Realisasi	:	Rp. 736.762.090,00
% Realisasi	:	63,42 %

3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN :

Pagu Anggaran	:	Rp. 780.602.819,00
Realisasi	:	Rp. 448.329.900,00
% Realisasi	:	57,43 %

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja Tahun 2020 dan 2021

Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hanya beberapa kegiatan saja yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditentukan (kurang dari 85%), sebagaimana telah disebutkan diatas. Secara rinci realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.1
Realisasi Kegiatan Yang Memenuhi Target 2020**

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
4.05.4.05.01.01.12	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.284.760.301,00	1.263.858.597	20.901.703,93
4.05.4.05.01.01.12.01	Pelayanan administrasi perkantoran	1.093.717.501,00	1.074.522.651	19.194.850,00
4.05.4.05.01.01.12.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	191.042.800,00	189.335.946,07	1.706.853,93
4.05.4.05.01.01.12.03	Pengelolaan administrasi keuangan	0,00	0,00	-
4.05.4.05.01.01.15	Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur	1.088.808.084,00	943.922.644,00	144.885.440,00
4.05.4.05.01.01.15.01	Penyajian dan Pengolahan Data Kepegawaian	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
4.05.4.05.01.01.15.02	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur	15.746.396,00	15.746.396,00	0,00
4.05.4.05.01.01.15.03	Seleksi JPT Pratama Secara Terbuka	0,00	0,00	0,00
4.05.4.05.01.01.15.04	Pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi Aparatur berdasarkan hasil Pemetaan Kompetensi	241.251.148,00	237.445.448,00	3.805.700,00
4.05.4.05.01.01.15.05	Layanan Administrasi Kepegawaian	10.615.400,00	10.615.400,00	0,00
4.05.4.05.01.01.15.06	Seleksi CPNS	815.995.140,00	771.030.201,00	44.964.939,00
4.05.4.05.01.01.16	Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	3.223.909.453,00	3.067.672.887,00	156.236.566,00
4.05.4.05.01.01.16.01	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	124.368.663,00	123.093.663,00	1.275.000,00
4.05.4.05.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	74.865.590,00	63.580.590,00	11.285.000,00
4.05.4.05.01.01.16.03	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	2.629.393.050,00	2.614.318.183,00	15.074.867,00
4.05.4.05.01.01.16.04	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	182.340.100,00	181.398.401,00	941.699,00
4.05.4.05.01.01.16.05	Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijazah	15.577.450,00	15.577.450,00	0,00
4.05.4.05.01.01.16.06	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi	197.364.600,00	197.364.600,00	0,00
	JUMLAH	5.597.477.838,00	5.275.454.128,07	322.023.709,93

Tabel 2.2
Kegiatan Tahun 2021 Yang Telah Terealisasi Sampai Dengan 31
Desember 2021

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.937.300,00	1.526.000,00	411.300,00	78,77%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.937.300,00	1.526.000,00	411.300,00	78,77%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.081.403.844,00	7.975.942.650,00	3.105.461.194,00	71,98%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.145.900,00	970.500,00	175.400,00	84,69%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.919.577.944,00	7.826.562.150,00	3.093.015.794,00	71,67%
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.680.000,00	148.410.000,00	12.270.000,00	92,36%
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.125.200,00	12.402.500,00	3.722.700,00	76,91%
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelegkapannya	16.125.200,00	12.402.500,00	3.722.700,00	76,91%
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	933.221.756,00	723.805.352,00	209.416.404,00	77,56%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.085.600,00	5.049.000,00	1.036.600,00	82,97%
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.045.368,00	56.159.600,00	14.885.768,00	79,05%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.824.700,00	37.756.700,00	16.068.000,00	70,15%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.833.460,00	110.226.975,00	1.606.485,00	98,56%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.528.840,00	10.350.000,00	4.178.840,00	71,24%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	675.903.788,00	504.263.077,00	171.640.711,00	74,61%
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.045.214,00	219.530.800,00	9.514.414,00	95,85%
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.045.214,00	219.530.800,00	9.514.414,00	95,85%
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	522.052.200,00	459.019.651,00	63.032.549,00	87,93%

19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.252.200,00	106.833.937,00	43.418.263,00	71,10%
20	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	371.800.000,00	352.185.714,00	19.614.286,00	94,72%
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	427.450.470,00	394.693.412,21	32.757.057,79	92,34%
22	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.838.600,00	71.292.129,00	10.546.471,00	87,11%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.749.270,00	53.551.000,00	17.198.270,00	75,69%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.862.600,00	269.850.283,21	5.012.316,79	98,18%
25	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.161.775.564,00	736.762.090,00	425.013.474,00	63,42%
26	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.278.200,00	3.234.000,00	44.200,00	98,65%
27	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.101.504.509,00	699.403.090,00	402.101.419,00	63,50%
28	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.189.600,00	10.157.000,00	32.600,00	99,68%
29	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	46.803.255,00	23.968.000,00	22.835.255,00	51,21%
30	Mutasi dan Promosi ASN	780.602.819,00	448.329.900,00	332.272.919,00	57,43%
31	Pengelolaan Mutasi ASN	186.077.636,00	139.916.900,00	46.160.736,00	75,19%
32	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	42.544.200,00	27.061.000,00	15.483.200,00	63,61%
33	Pengelolaan Promosi ASN	551.980.983,00	281.352.000,00	270.628.983,00	50,97%
34	Pengembangan Kompetensi ASN	693.015.141,00	600.491.833,00	92.523.308,00	86,65%
35	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	632.954.750,00	559.765.033,00	73.189.717,00	88,44%
36	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.060.391,00	40.726.800,00	19.333.591,00	67,81%
37	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	343.283.982,00	271.182.900,00	72.101.082,00	79,00%
38	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	147.590.882,00	111.234.500,00	36.356.382,00	75,37%
39	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	11.638.000,00	6.400.000,00	5.238.000,00	54,99%

40	Pembinaan Disiplin ASN	168.522.600,00	146.703.400,00	21.819.200,00	87,05%
41	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.532.500,00	6.845.000,00	8.687.500,00	44,07%^{h] z}
42	Pengembangan Kompetensi Teknis	516.985.791,00	435.478.850,00	81.506.941,00	84,23%
43	Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	516.985.791,00	435.478.850,00	81.506.941,00	84,23%
44	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.575.243.443,00	1.456.981.791,00	118.261.652,00	92,49%
45	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.575.243.443,00	1.456.981.791,00	118.261.652,00	92,49%
JUMLAH		18.282.142.724	13.736.147.729,21	4.545.994.994,79	75%

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan Tahun 2021 :

1. Harga satuan atas realisasi belanja lebih rendah dari harga satuan yang ditetapkan dalam SIPD sehingga terdapat sisa pagu anggaran.
2. Adanya pembatasan aktif (rapat/diklat yang dilakukan secara zoom/virtual sehingga terdapat beberapa belanja. Ex : mamin yang tidak dapat diserap dengan maksimal.)
3. Adanya sisa anggaran atas belanja gaji dan tunjangan disebabkan karena terdapat beberapa jabatan kosong / tidak terisi pada BKPSDM s.d 31 Desember 2021.
4. Adanya sisa anggaran atas pengadaan CASN disebabkan alokasi dana yang harusnya digunakan untuk pengadaan CPNS dan P3K Guru ternyata hanya terserap pada pengadaan CPNS saja karena untuk formasi P3K Guru diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target kinerja program/kegiatan yang telah direncanakan:

1. Setiap Kasubid dan Kasubag membuat time scedule untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan disampaikan kepada Dinas dalam kurun waktu 1 tahun dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara triwulan untuk updating waktu kegiatan yang telah direncanakan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan target yang dicapai.
3. Menganggarkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dengan tolak ukur kegiatan di tahun sebelumnya, sehingga meminimalisir tidak tercapainya serapan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto

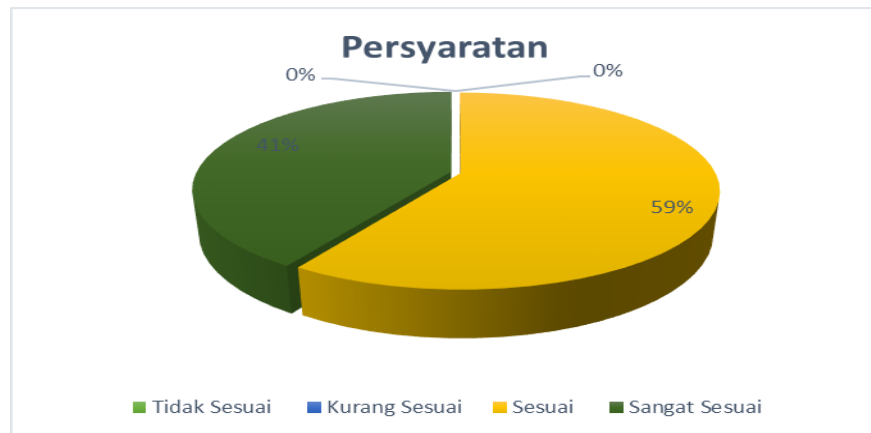
Dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto diperlukan adanya manajemen kepegawaian yang baik yaitu dengan penyusunan Program Kerja yang inovatif dan secara komprehensif diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Mojokerto. Kebijakan dalam pembinaan kepegawaian tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto yang secara garis besar diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, yang realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Layanan Administrasi Kepegawaian

1) Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS

Berikut disampaikan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS ditinjau dari segi persyaratan pelayanan dan Unsur Prosedur Layanan

Gambar 2.1
Komposisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Dari Segi Persyaratan Layanan

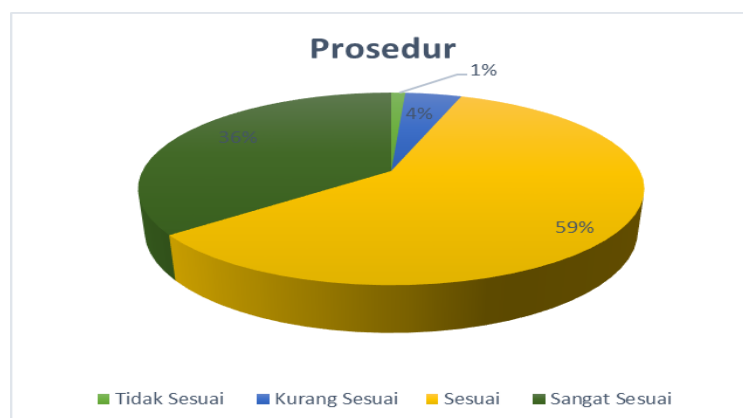


Tabel 2.3
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS dari Unsur Persyaratan Layanan

No	Persyaratan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0,00
2	Kurang Sesuai	0	0,00
3	Sesuai	55	59,14
4	Sangat Sesuai	38	40,86

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, responden dominan menyampaikan bahwa persyaratan layanan untuk pemrosesan kenaikan pangkat PNS sudah sesuai dengan frekuensi terbesar, yakni 59,14% dari jumlah keseluruhan responden.

Gambar 2.2
Komposisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Dari Segi Prosedur Layanan

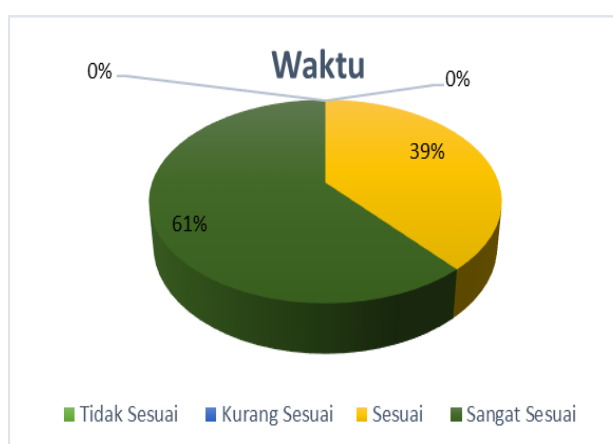


Tabel 2.4
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS dari Unsur Prosedur Layanan

No	Prosedur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	1	1,08
2	Kurang Sesuai	4	4,30
3	Sesuai	55	59,14
4	Sangat Sesuai	33	35,48

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, responden dominan menyampaikan bahwa prosedur layanan untuk pemrosesan kenaikan pangkat PNS sudah mudah, tidak dipersulit dengan frekuensi terbesar, yakni sebesar 59,14% dari jumlah keseluruhan responden.

Gambar 2.3
Komposisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Dari Segi Waktu Layanan



Tabel 2.5
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS dari Unsur Prosedur Layanan

No	Waktu	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0,00
2	Kurang Sesuai	0	0,00
3	Sesuai	36	38,71
4	Sangat Sesuai	57	61,29

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, responden dominan menyampaikan bahwa prosedur layanan untuk pemrosesan kenaikan pangkat PNS sudah mudah, yakni dengan jumlah sebesar 61,29% dari jumlah keseluruhan responden.

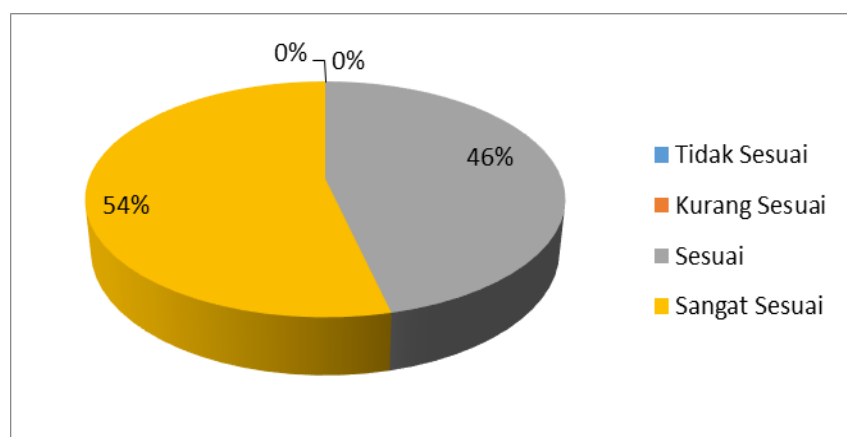
Dapat disimpulkan bahwa responden yang menyatakan bahwa layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat “**sangat baik**” adalah sebanyak 48,03% dari jumlah sampel dan yang menyatakan “**baik**” sebanyak 51,14%. Serta, responden yang menilai layanan pemrosesan kenaikan pangkat “**kurang baik**” sebanyak 6 orang atau sebesar 0,17% dari jumlah responden dan “**tidak baik**” nihil. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat adalah bernilai **85,90**.

- 2) **Layanan Pemrosesan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar**
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.6
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	0
3	Sesuai	33,78
4	Sangat Sesuai	39,22

Gambar 2.4
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas pelayanan pemrosesan pemberian ijin dan tugas belajar “**sangat sesuai**” adalah sebanyak sebesar 54% dari jumlah responden. Responden yang menyatakan “**sesuai**” sebesar 46%. Serta responden yang menyatakan “**kurang**

baik” dan **“tidak sesuai”** adalah nihil. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar adalah bernilai **85,70**.

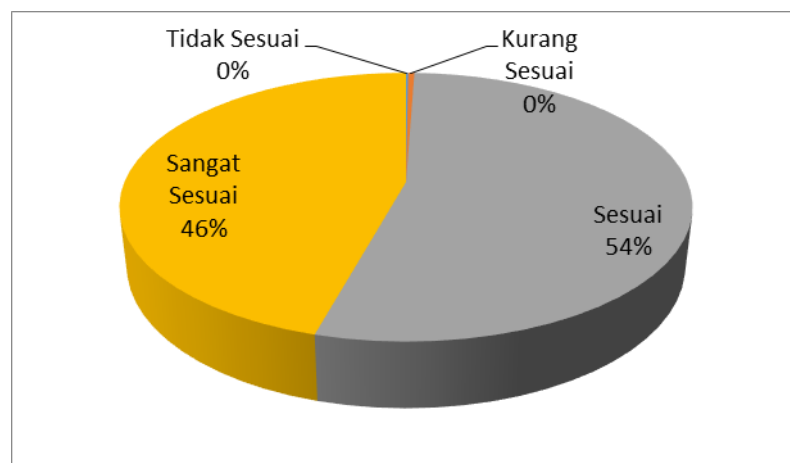
3) **Layanan Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)**

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0,14
2	Kurang Sesuai	0,42
3	Sesuai	53,73
4	Sangat Sesuai	45,71

Gambar 2.5
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas Layanan Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) **“sangat sesuai”** adalah sebesar 46% dari jumlah responden. Responden yang menyatakan **“sesuai”** sebesar 54%. Serta responden yang menyatakan **“kurang sesuai”** dan menyatakan **“tidak sesuai”** adalah kurang dari 1% i

jumlah responden. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) adalah bernilai **85,39**

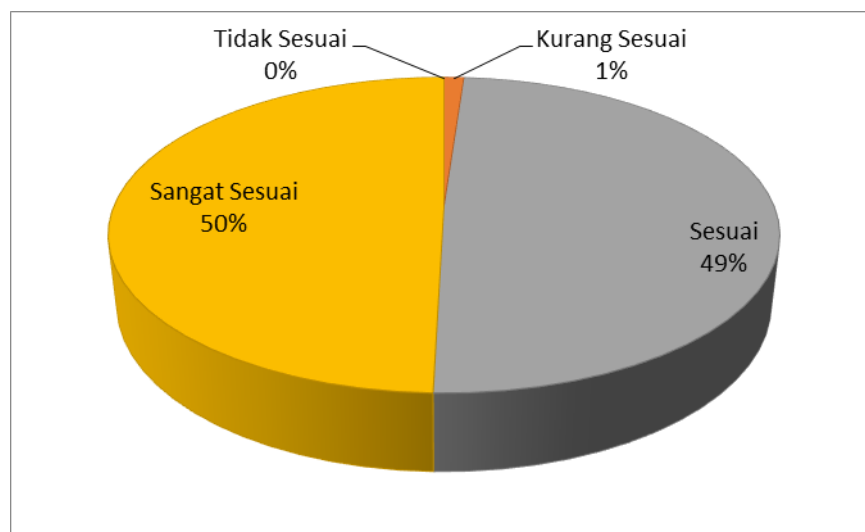
4) **Layanan Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional**

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	1,14
3	Sesuai	49,29
4	Sangat Sesuai	49,57

Gambar 2.6
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas Layanan Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional “**sangat sesuai**” adalah 49,57 % dari jumlah responden. Responden yang menyatakan “**sesuai**” sebesar 49%. Serta responden yang menyatakan “**kurang sesuai**” sebesar 1% dan menyatakan “**tidak sesuai**” NIHIL. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional adalah bernilai **86,24**.

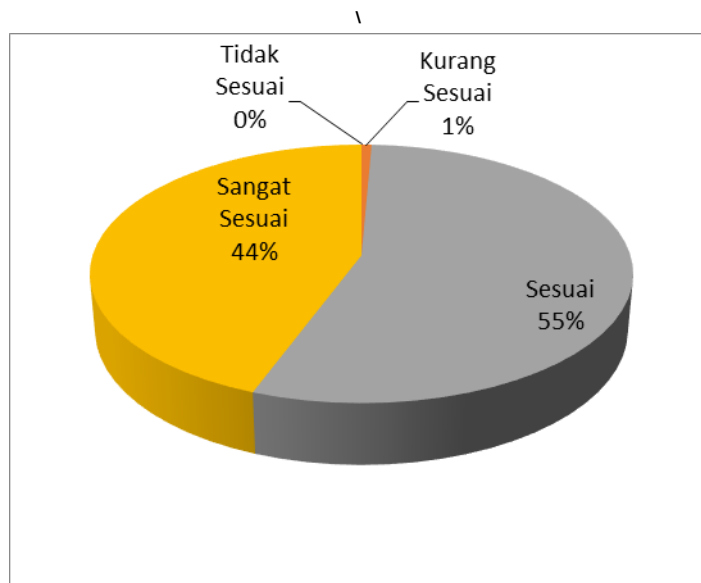
5) Layanan Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Kepuasan Masyarakat Terhadap Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	0,69
3	Sesuai	55,01
4	Sangat Sesuai	44,31

Gambar 2.7
Kepuasan Masyarakat Terhadap Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas Layanan Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah “**sangat sesuai**” adalah sebesar 44% dari jumlah responden. Responden yang menyatakan “**sesuai**” sebesar 55%. Serta responden yang menyatakan “**kurang sesuai**” sebesar 1% dan menyatakan “**tidak sesuai**” NIHIL. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bernilai **85,05**.

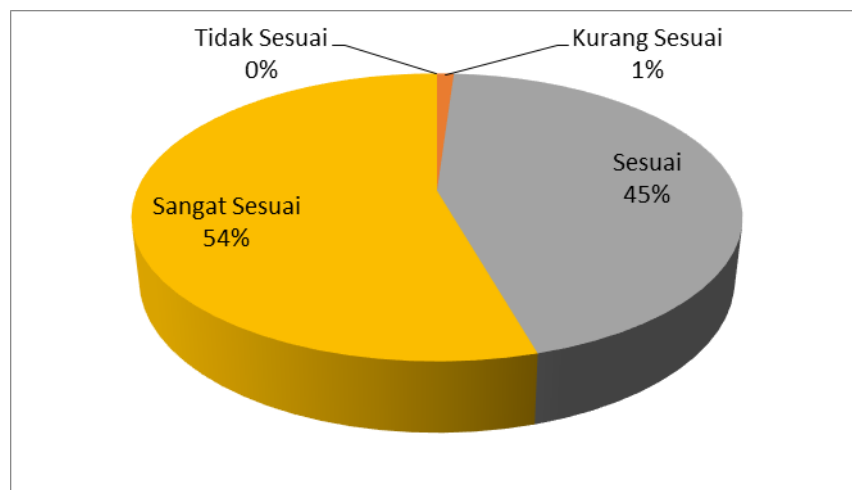
6) **Layanan Pemrosesan Tambahan Penghasilan Pegawai / TPP**

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Tambahan Penghasilan Pegawai / TPP

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	1,06
3	Sesuai	44,50
4	Sangat Sesuai	54,44

Gambar 2.8
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Tambahan Penghasilan Pegawai / TPP



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas Layanan Pemrosesan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya “**sangat sesuai**” adalah sebesar 54% dari jumlah total responden sebanyak 209 orang. Dan Responden yang menyatakan “**sesuai**” sebanyak sebesar 45%. Serta responden yang menyatakan “**kurang sesuai**” sebesar 1% dan menyatakan “**tidak sesuai**” NIHIL. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Tambahan Penghasilan Pegawai / TPP bernilai **87,46**.

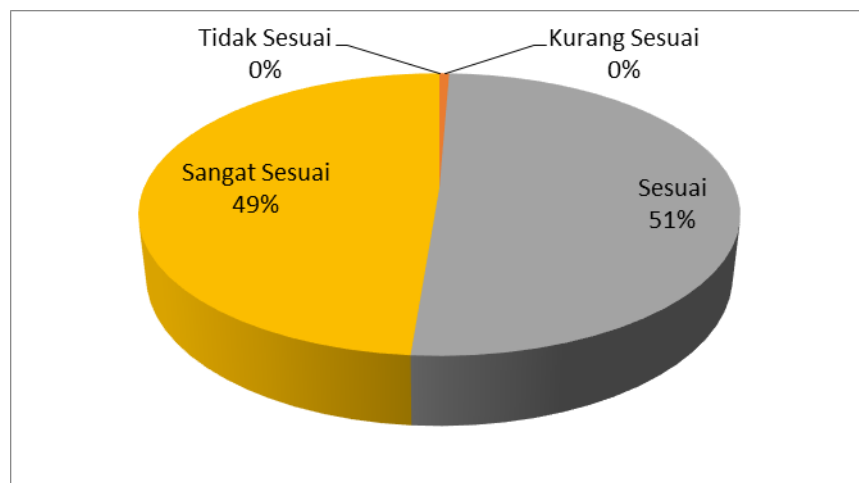
7) Layanan Sistem Informasi Kepegawaian

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemrosesan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sistem Informasi Kepegawaian

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	0,63
3	Sesuai	50,63
4	Sangat Sesuai	48,74

Gambar 2.9
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemrosesan Sistem Informasi Kepegawaian



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas Layanan Simoker (Informasi Data Kepegawaian) “**sangat sesuai**” adalah sebesar 49% dari total jumlah responden 88 orang. Responden yang menyatakan “**sesuai**” sebesar 51%. Serta responden yang menyatakan “**kurang sesuai**” dan “**tidak sesuai**” NIHIL. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sistem Informasi Kepegawaian adalah bernilai **86,16**.

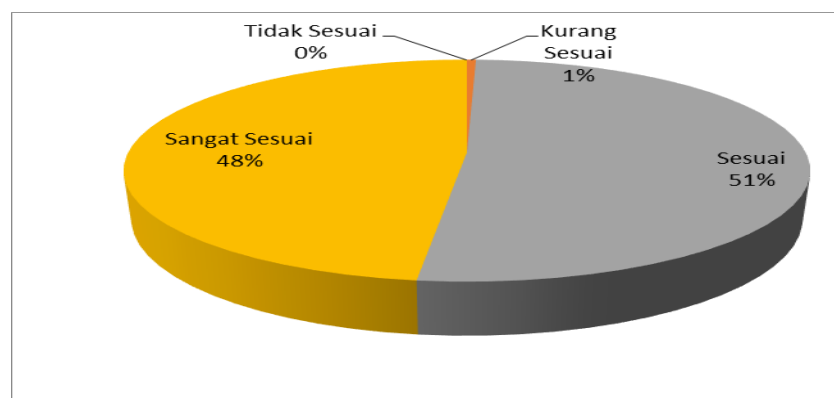
8) Layanan E-PRESENSI

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan E-PRESENSI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan E-PRESENSI

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0
2	Kurang Sesuai	0,50
3	Sesuai	51,49
4	Sangat Sesuai	48,02

Gambar 2.10
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan E-PRESENSI



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas Layanan E-PRESENSI “**sangat sesuai**” adalah sebesar 48% dari total jumlah responden sebanyak 112 orang. Responden yang menyatakan “**sesuai**” sebesar 51%. Serta responden yang menyatakan “**kurang sesuai**” sebesar 1% dan menyatakan “**tidak sesuai**” NIHIL. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan E-PRESENSI adalah bernilai **86,01**.

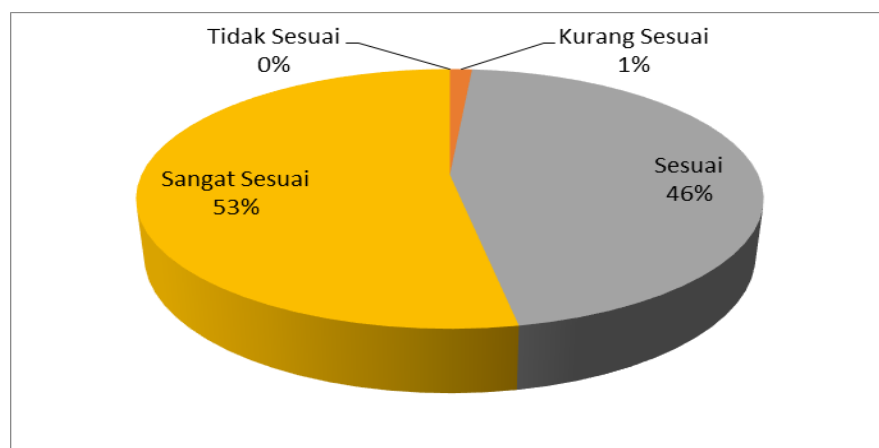
9) Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian

No	Keterangan	Presentase (%)
1	Tidak Sesuai	0,00
2	Kurang Sesuai	1,36
3	Sesuai	45,71
4	Sangat Sesuai	52,93

Gambar 2.11
Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan kualitas Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian “**sangat sesuai**” adalah sebesar 53% dari total jumlah responden sebanyak 220 orang. Responden yang menyatakan “**sesuai**” sebesar 46%. Serta responden yang menyatakan “**kurang sesuai**” sebesar 1% dan menyatakan “**tidak sesuai**” NIHIL. Dari hasil tersebut, kemudian dapat ditentukan rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Legalisir Salinan Dokumen Kepegawaian adalah bernilai **87.01**.

B. Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur

1) Uji Kompetensi Aparatur

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Character Assesment terhadap jabatan pelaksana sebanyak 362 orang di lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto.

2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.14
Jumlah Peserta dalam Setiap Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa	70
2.	Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)	32
3.	Diklat PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator)	15
4.	Latsar	124
5.	Digital Trainig Scholarship	250
6.	Pelayanan Publik	40
7.	Sekretaris	2
8.	Kepamongprajaan	1
9.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Produk Makanan Minuman Ringan	1
10.	District Food Inspector	2

3) Pelaksanaan Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2021

Hasil pemrosesan penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin PNS sepanjang Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.15
Penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin PNS Tahun 2021

JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JUMLAH
JUMLAH PNS KESELURUHAN	2.556 orang
Pelanggaran Disiplin Ringan	2 orang
Pelanggaran Disiplin Sedang	1 orang
Pelanggaran Disiplin Berat	- orang
JUMLAH PNS YANG MELANGGAR DISIPLIN	3 orang
PERSENTASE APARATUR YANG TIDAK MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN PNS	99,89%

- **Pelanggaran Disiplin Ringan**

Pada Tahun 2021 terdapat sanksi disiplin ringan sebanyak 2 orang, penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin sedang berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

- **Pelanggaran Disiplin Sedang**

Pada Tahun 2021 terdapat sanksi disiplin sedang sebanyak 1 orang, penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin sedang berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun.

- **Pelanggaran Disiplin Berat**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dibidang manajemen kepegawaian. Namun, keberadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto sebagai pengelola kepegawaian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pusat. Hal ini karena sebagian besar regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian masih bersifat kebijakan pusat yang didelegasikan ke daerah. Sebagai contoh konkret dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu tonggak fundamental terhadap reformasi birokrasi terutama dalam bidang manajemen kepegawaian. Hal ini berakibat terhadap semua pengelolaan kepegawaian di seluruh Wilayah Republik Indonesia harus dirombak dengan mengacu kepada undang-undang ini. Dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika lokal daerah, namun juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar daerah baik tingkat provinsi, nasional maupun regional.

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan urusan tugas pokok dan fungsi organisasi serta dinamika lokal/daerah yang terjadi disajikan sebagai berikut :

1. Masalah kinerja Aparatur Pemerintah yang masih perlu ditingkatkan.

Kinerja aparatur pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat kompetensi aparatur, kesesuaian penempatan dalam jabatan, adanya motivasi dalam pelaksanaan tugas jabatan, serta beberapa faktor lain.

Salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja aparatur adalah diberikannya TPP untuk setiap PNS berdasarkan kelas jabatan yang ditetapkan. Perhitungan persentase pemberian TPP juga berdasarkan kinerja harian yang di isikan dalam aplikasi E KINERJA yang terus dilakukan updating serta berdasarkan absensi.

2. Masalah Kualifikasi dan kompetensi Aparatur Pemerintah yang masih perlu ditingkatkan.

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal utama yang sangat mempengaruhi kualitas kinerja aparatur pemerintah. Tuntutan akan peningkatan kualitas SDM aparatur merupakan keniscayaan yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Kualitas pelayanan publik akan menurun jika kualitas SDM penyelenggara pelayanan publik tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Badan kepegawaian sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi peningkatan SDM aparatur dituntut untuk dapat senantiasa mengembangkan potensi SDM aparatur yang dimiliki.

Sesuai dengan Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi ASN adalah diselenggarakannya diklat, baik diklat struktural maupun diklat teknis. Selain itu juga dilakukan uji kompetensi sebagai tahapan dalam pengisian jabatan sehingga pengisian jabatan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan.

3. Masalah keberadaan pelayanan kepegawaian yang memanfaatkan teknologi informasi.

Keberadaan layanan kepegawaian yang terintegrasi dan modern yang belum terpenuhi selama ini masih menyebabkan masalah keterlambatan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, validasi data dan lain sebagainya. Namun berjalannya waktu dan tuntutan jaman, BKPSDM telah membangun beberapa aplikasi guna memperlancar pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya :

- Aplikasi SIMOKER yang merupakan aplikasi untuk menampilkan data kepegawaian per individu dan dapat juga digunakan untuk mengetahui rekapitulasi absensi.

- APLIKASI E KINERJA yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaporkan aktifitas harian yang dipergunakan dalam perhitungan TPP.
- Absensi melalui mesin finger yang merupakan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai dan sebagai dasar perhitungan TPP.
- Aplikasi E SKP yang merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk melaporkan sasaran kinerja pegawai secara elektronik.
- Aplikasi SICANTIK (Sistem Informasi Cuti ASN Elektronik) yang merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mempermudah pelayanan penerbitancuti ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

4. Masalah distribusi pegawai yang belum merata

Pemerataan distribusi pegawai masih menjadi masalah yang dihadapi oleh sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam kenyataan yang ada, masih banyak ditemukan adanya kekurangan staf (jabatan fungsional umum) di sebagian besar OPD. Sehingga dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut maka setiap tahun setiap OPD melakukan usulan formasi yang dibutuhkan dan melakukan seleksi CPNS jika memungkinkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD maka kita dapat melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel T-C.31.

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) program dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program – program tersebut adalah gambaran mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam program dan kegiatan yang direncanakan di Tahun 2022 terdapat kegiatan yang merupakan anggaran responsif gender, dimana anggaran tersebut disusun dan melalui proses analisis dalam perspektif gender. Tahun 2022 anggaran responsif gender ada pada Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Usulan program dan kegiatan ini bersumber dari usulan masing – masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang secara resmi berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 7 April 2017. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, manajemen PNS diselenggarakan dengan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit tersebut diselenggarakan pada seluruh aspek manajemen PNS, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan Pegawai Negeri Sipil.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi terutama mendukung penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Program dan kegiatan tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto Tahun 2022. Program dan kegiatan tersebut merupakan prioritas dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto Tahun 2022 yang menjadi motor penggerak implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tersebut.

Program yang mendukung Undang-Undang tersebut meliputi :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja mengacu pada dokumen RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dimana pada Tahun 2020 telah dilakukan review terhadap dokumen RENSTRA tersebut. Dari hasil review terhadap tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian dapat diuraikan tentang tujuan, indikator tujuan serta target tujuan sampai pada akhir periode RENSTRA untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan organisasai.

Dalam rangka mendukung visi dan misi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto ingin mewujudkan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang memuaskan, dari hal tersebut kemudian dapat dirumuskan tentang tujuan dari eksistensi organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto. Tujuan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirumuskan sebagai berikut.

a. Tujuan Strategis

Sesuai dengan Misi Walikota Mojokerto yang tercantum dalam RPJMD, maka Badan Kepegawaian masuk dalam pencapaian misi ke II yaitu **“Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Efektif, Demokratis, Bersih, Profesional dan Adil dalam melayani Masyarakat”**.

Dari tujuan ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa eksistensi Badan Kepegawaian memiliki tujuan untuk memacu dan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur untuk menuju ASN yang Profesional.

b. Sasaran Strategis

Dari tujuan tersebut, kemudian dijabarkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus kinerja Badan Kepegawaian dalam periode 5 tahun (Tahun 2019 – 2023) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Sasaran Strategis-Indikator Sasaran (IKU)

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Penjelasan Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aparatur sesuai dengan sistem Merit	Indeks Penerapan Sistem Merit	$Index = \sum_{i=1}^n Skor\ aspek_i$	Indeks Sistem Merit merupakan hasil penjumlahan dari setiap aspek implementasi Sistem Merit berdasarkan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil	250
		Nilai SKM Pelayanan Kepegawaian	$IKM = \frac{\sum_{i=1}^n Skor_i \times f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$	IKM dihitung dengan rumus perkalian antara Skor survei pelayanan kepegawaian dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan.	85
		Nilai SAKIP	$Nilai\ SAKIP = \sum_{i=1}^n Skor\ aspek_i$	Nilai SAKIP merupakan jumlah rata-rata nilai per aspek penilaian SAKIP.	A
2	Meningkatnya kompetensi, kedisiplinan dan kinerja aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti Diklat-Diklat minimal 20 JP dalam satu tahun	$\%Diklat_{20JP} = \frac{N_{\geq 20JP}}{N_{PNS}} \times 100\%$	Persentase diklat minimal 20 JP dirumuskan dengan Jumlah PNS yang mengikuti diklat minimal 20 JP pada tahun berjalan dibagi jumlah PNS dikali seratus persen.	10%
Rata-rata nilai kinerja aparatur		$Nilai\ Kinerja = \frac{\sum_{i=1}^n SKP_i + \sum_{i=1}^n Perilaku_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$	Rata-rata nilai kinerja aparatur diperoleh dari rata-rata nilai SKP ditambah rata-rata nilai perilaku	90	

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi rujukan Badan kepegawaian antara lain :

- Penyelenggaraan manajemen PNS berdasarkan Sistem Merit. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan manajemen PNS didasarkan pada system merit.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penyelenggaraan manajemen PNS dengan system merit ini direalisasikan melalui beberapa kegiatan dalam usulan Renja 2022 antara lain :

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
- b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- c. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- d. Mutasi dan Promosi ASN

- Peningkatan kompetensi aparatur

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada Analisa kesenjangan kompetensi, dan Rencana pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi aparatur dituangkan dalam beberapa kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
- b. Pengembangan Kompetensi ASN
- c. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 (tiga) program dan jumlah kegiatan sebanyak 13 (enam belas) kegiatan. Sasaran kegiatan pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah Kota Mojokerto. Jumlah total kebutuhan pagu indikatif adalah sebesar Rp 18.155.575.367,00. Secara rinci rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 disajikan pada tabel T-C.33

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MOJOKERTO

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Tahun 2022				Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	6			7	8
KEPEGAWAIAN								
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jl. Bhayangkara No 42 Kota Mojokerto	NILAI SAKIP BKPSDM	A 100%	14.275.963.795			A 100%	14.962.114.485
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100%	4.500.000,00			100%	4.500.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 dokumen	2.250.000,00	Dana Umum		4 dokumen	2.250.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	4 dokumen	2.250.000,00	Dana Umum		4 dokumen	2.250.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	12.057.363.795,00			100%	12.660.414.485,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah transaksi pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	240 transaksi	11.887.299.795,00	Dana Umum		240 transaksi	12.481.664.785,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan yang dibayarkan	96 transaksi	168.714.000,00	Dana Umum		96 transaksi	177.149.700,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 dokumen	1.350.000,00	Dana Umum		4 dokumen	1.600.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	22.050.000,00			100%	26.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang disediakan	98 potong	22.050.000,00			98 potong	26.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1.123.550.000,00			100%	1.147.700.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah macam Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 macam	6.500.000,00	Dana Umum		6 macam	7.200.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah macam ATK yang disediakan	25 macam	63.900.000,00			25 macam	75.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah macam Bahan Logistik kantor yang disediakan	14 macam	34.200.000,00			14 macam	40.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah macam Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 macam	110.000.000,00			5 macam	115.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12 bulan	13.950.000,00			12 bulan	16.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	80 kali 12 kali	895.000.000,00	Dana Umum		80 kali 12 kali	894.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang disediakan	100%	126.000.000,00			100%	135.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dilaksanakan	5 unit	126.000.000,00	Dana Umum		5 unit	135.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemeritahan daerah yang disediakan	100%	607.500.000,00			100%	658.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran Rekening Listrik, Telepon, air dan internet kantor yang dilaksanakan	48 transaksi	92.700.000,00			48 transaksi	108.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	156 transaksi	514.800.000,00	Dana Umum		156 transaksi	550.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	335.000.000,00			100%	330.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dilaksanakan	4960 Liter 12 Kali 5 Transaksi	80.000.000,00	Dana Umum		4960 Liter 12 Kali 5 Transaksi	80.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan sesuai kebutuhan	12 kali	55.000.000,00			12 kali	70.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor yang dilaksanakan sesuai rencana	3 paket	200.000.000,00			3 paket	180.000.000,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks Penerapan Sistem Merit	Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	2.661.600.000,00			Penerapan Sistem Merit Kategori III (baik)	2.951.000.000,00
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN pensiun yang diproses dan usulan Formasi ASN yang diajukan	320 orang	1.188.000.000,00			320 orang	1.310.000.000,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kebutuhan PNS, CPNS dan PPPK	3 dokumen	18.000.000,00	Dana Umum		3 dokumen	25.000.000,00

	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan PPPK yang diproses	3.000 orang	1.000.000.000,00			3.000 orang	1.100.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah permohonan Kartu Pegawai dan Permohonan Pensiun yang diproses	152 orang	115.000.000,00			152 orang	120.000.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Data PNS yang divalidasi	12 dokumen	55.000.000,00			12 dokumen	65.000.000,00
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi dan kenaikan pangkat	516 orang PNS	585.450.000,00			516 orang PNS	695.000.000,00
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi Mutasi	100 orang PNS	175.950.000,00	Dana Umum		100 orang PNS	200.000.000,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	500 orang PNS	40.500.000,00			500 orang PNS	45.000.000,00
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi terbuka	16 orang PNS	369.000.000,00			16 orang PNS	450.000.000,00
	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase aparatur yang telah dilakukan pemetaan kompetensi	20%	640.800.000,00			20%	678.500.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah Aparatur yang mengikuti assessment Kompetensi	300 orang PNS	585.000.000,00	Dana Umum		300 orang PNS	620.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah PNS pengajuan ijin belajar, tugas belajar serta penyesuaian ijazah PNS yang diproses	170 orang PNS	55.800.000,00	Dana Umum		170 orang PNS	58.500.000,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rata-rata nilai kinerja aparatur	90,00	247.350.000,00			90,00	267.500.000,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah PNS yang telah dilakukan analisis atas kesenjangan kinerja	2.800 orang PNS	94.500.000,00	Dana Umum		2.800 orang PNS	110.000.000,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan atas capaian kinerja	10 orang	13.000.000,00			10 orang	15.000.000,00

	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah data kehadiran dan disiplin yang dikelola	2800 data	125.000.000,00		2800 data	125.000.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin yang disusun	8 rekomendasi	14.850.000,00		8 rekomendasi	17.500.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.216.911.572,00			2.285.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	10%	2.216.911.572,00		10%	2.285.000.000,00
Pengembangan Kompetensi Teknis			Persentase Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	250.411.572,00		100%	285.000.000,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	100 orang PNS	250.411.572,00	Dana Umum	100 orang PNS	285.000.000,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Persentase PNS yang mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	1.966.500.000,00		100%	2.000.000.000,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan prajabatan	196 orang PNS	1.966.500.000,00		196 orang PNS	2.000.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 disertai kebutuhan pendanaannya sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Prog		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5,03	KEPEGAWAIAN			BKPSDM										
5.03.5.04.0.0 0.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI SAKIP BKPSDM	A 100%					14.275.963.795,00	14.962.114.485,00	BARU	BKPSDM
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100%			4.500.000,00	4.500.000,00		

5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	4 dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00		
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase dokumen pertanggungja waban administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi			12.057.363.795,00	12.660.414.485,00		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Jumlah transaksi pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	240 transaksi	11.887.299.795,00	12.481.664.785,00		
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan yang dibayarkan	96 transaksi	168.714.000,00	177.149.700,00		
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 dokumen	1.350.000,00	1.600.000,00		

5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%			22.050.000,00	26.000.000,00		
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								Jumlah pakaian dinas yang disediakan	98 potong	22.050.000,00	26.000.000,00		
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%			1.123.550.000,00	1.147.700.000,00		
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah macam Komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 macam	6.500.000,00	7.200.000,00		
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Jumlah macam ATK yang disediakan	25 macam	63.900.000,00	75.000.000,00		
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Jumlah macam Bahan Logistik kantor yang disediakan	14 macam	34.200.000,00	40.000.000,00		

5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								Jumlah macam Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 macam	110.000.000,00	115.000.000,00		
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								Jumlah bulan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12 bulan	13.950.000,00	16.500.000,00		
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	80 Kali 12 Kali	895.000.000,00	894.000.000,00		
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase barang milik daerah yang disediakan	100%		126.000.000,00	135.000.000,00		
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dilaksanakan	5 unit	126.000.000,00	135.000.000,00		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%		607.500.000,00	658.500.000,00		

5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jumlah transaksi pembayaran tagihan Rekening Listrik, Telepon, air dan internet kantor yang dilaksanakan	48 transaksi	92.700.000,00	108.500.000,00		
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	156 transaksi	514.800.000,00	550.000.000,00		
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase barang milik daerah yang dipelihara			335.000.000,00	330.000.000,00		
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dilaksanakan	4960 Liter 12 Kali 5 Transaksi	80.000.000,00	80.000.000,00		
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan sesuai kebutuhan	12 kali	55.000.000,00	70.000.000,00		

5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor yang dilaksanakan sesuai rencana	3 paket	200.000.000,00	180.000.000,00		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Indeks Penerapan Sistem Merit	Baik					2.661.600.000,00	2.951.000.000,00	BARU	BKPSD M
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						Jumlah ASN pensiun yang diproses dan usulan Formasi ASN yang diajukan	320 orang			1.188.000.000,00	1.310.000.000,00		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								Jumlah Dokumen Formasi Kebutuhan PNS, CPNS dan PPPK	3 dokumen	18.000.000,00	25.000.000,00		
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN								Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan PPPK yang diproses	3.000 orang	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								Jumlah permohonan Kartu Pegawai dan Permohonan Pensiun yang diproses	152 orang	115.000.000,00	120.000.000,00		
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								Jumlah Data PNS yang divalidasi	12 dokumen	55.000.000,00	65.000.000,00		

5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN						Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi dan Kenaikan Pangkat	516 orang PNS			585.450.000,00	695.000.000,00		
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN								Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi Mutasi	100 orang PNS	175.950.000,00	200.000.000,00		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	500 orang PNS	40.500.000,00	45.000.000,00		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN								Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi Terbuka	16 orang PNS	369.000.000,00	450.000.000,00		
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN						Persentase aparatur yang telah dilakukan pemetaan kompetensi	20%			640.800.000,00	678.500.000,00		
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								Jumlah Aparatur yang mengikuti assessment Kompetensi	300 orang PNS	585.000.000,00	620.000.000,00		
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								Jumlah PNS pengajuan ijin belajar, tugas belajar serta penyesuaian ijazah yang diproses	170 orang PNS	55.800.000,00	58.500.000,00		
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Rata-rata nilai kinerja aparatur	90			247.350.000,00	267.500.000,00		

5.03.02.2.04 .02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								Jumlah PNS yang telah dilakukan analisis atas kesenjangan kinerja	2.800 orang PNS	94.500.000,00	110.000.000,00		
5.03.02.2.04 .04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai								Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan atas capaian kinerja	10 orang	13.000.000,00	15.000.000,00		
5.03.02.2.04 .07	Pembinaan Disiplin ASN								Jumlah data kehadiran dan disiplin yang dikelola	2800 data	125.000.000,00	125.000.000,00		
5.03.02.2.04 .08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								Jumlah Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Disiplin yang disusun	8 rekomendasi	14.850.000,00	17.500.000,00		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5.04.02	PRORGAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										2.216.911.572,00	2.285.000.000,00	BARU	BKPSD M
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis							Persentase Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana	100%		250.411.572,00	285.000.000,00		

5.04.02.2.01 .03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	100 orang PNS	250.411.572,00	285.000.000,00		
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						Persentase PNS yang mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%			1.966.500.000,00	2.000.000.000,00		
5.04.02.2.02 .07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan prajabatan	196 orang PNS	1.966.500.000,00	2.000.000.000,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto Tahun 2022 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra SKPD selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan RKA-PD Tahun 2022.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Renja PD selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA-PD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto untuk periode tahunan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Mojokerto, Juli 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA MOJOKERTO

Drs. MUHAMMAD IMRON

Pembina Utama Muda
NIP. 19640807 199206 1 001

